

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA	viii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xv
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Lalar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian	14
1. Manfaat Akademis.....	14
2. Manfaat Praktis.....	14
E. Kajian Pustaka.....	15
F. Kerangka Teori.....	17
G. Metode Penelitian.....	21
1. Heuristik	22
2. Kritik Sumber	25

3. Interpretasi.....	26
4. Historiografi	28
H. Sistematika Penulisan (Rencana Bab).....	29
BAB II	30
PLURALISME KEAGAMAAN DAN KEBEBASAN BERKEYAKINAN DI INDONESIA	30
A. Pluralisme Beragama	35
1. Apa itu pluralisme keagamaan (keberagaman agama).....	35
2. Jaminan kebebasan beragama dalam UUD 1945	39
3. Batasan dalam menjalankan kebebasan beragama di Indonesia	44
B. Kehidupan Sosial dalam Keragaman Agama.....	47
1. Hubungan antarumat beragama dalam kehidupan sehari-hari	47
2. Peran sekolah, media, dan masyarakat dalam membangun sikap toleransi 53	
C. Tantangan dan Upaya Memperkuat Kebebasan Beragama.....	58
1. Tantangan antara kebebasan individu dan menjaga ketertiban masyarakat 58	
2. Peran pemerintah dan lembaga hukum dalam melindungi hak warga ...	63
3. Pentingnya pendidikan toleransi dan kesadaran masyarakat.....	67
BAB III.....	71
SEJARAH PENGAKUAN ALIRAN KEPERCAYAAN DI INDONESIA (1965 – 2017)	71
A. Perkembangan historis pengakuan aliran kepercayaan di Indonesia dari 1965 hingga 2017	74
1. Akar Historis Aliran Kepercayaan dalam Masyarakat Indonesia.....	74
2. Periode 1965–1998: Orde Baru dan Restriksi Institusional	75

3. Periode 1998–2010: Reformasi dan Pembukaan Ruang Sipil.....	85
4. Periode 2010–2017: Perjuangan Hukum dan Pengakuan Formal.....	91
B. Dinamika Politik, Sosial, dan Hukum.....	97
1. Dimensi Politik.....	98
2. Dimensi Sosial.....	102
3. Dimensi Hukum	104
BAB IV	108
PERAN NEGARA DAN AGAMA DALAM MEMBENTUK KEBIJAKAN	108
A. Peran Negara dalam Membentuk Kebijakan terhadap Kelompok Kepercayaan	110
1. Pengakuan agama dan posisi “kepercayaan” dalam hukum nasional ...	110
2. Diskriminasi administratif dalam KTP, KK, perkawinan, dan Pendidikan 113	
3. Kebijakan negara terhadap kelompok kepercayaan	117
B. Peran Agama dalam Membentuk Kebijakan Negara	119
1. Pengaruh agama mayoritas dalam kebijakan publik	119
2. Hubungan antara elite politik dan organisasi keagamaan	122
3. Stigma sosial terhadap kelompok kepercayaan.....	124
C. Perjuangan Kelompok Kepercayaan dalam Memperoleh Pengakuan	126
1. Peran masyarakat sipil dan lembaga hak asasi manusia.....	126
2. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016	130
3. Dampak putusan terhadap pengakuan administratif penghayat kepercayaan	133
D. Analisis Hubungan Negara, Agama, dan Hak Asasi Manusia	136
1. Analisis Hubungan Negara, Agama dan Penghayat Kepercayaan	136

2. Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia.....	140
3. Tantangan Pluralisme dan Toleransi di Indonesia	143
4. Arah Kebijakan yang Lebih Inklusif bagi Kelompok Kepercayaan	146
BAB V	150
PENUTUP	150
A. Kesimpulan	150
B. Saran.....	152
DAFTAR PUSTAKA	154

